

## TANTANGAN BERAT APBD TAPSEL 2025: BELANJA PEGAWAI NAIK INFRASTRUKTUR TERTEKAN



Sumber Gambar : [sumut.antaranews.com](http://sumut.antaranews.com)

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapsel, M.Frananda dikonfirmasi ANTARA, Selasa (28/1), mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah akan semakin sulit dan berdampak signifikan pada berbagai sektor belanja.

Walau, total belanja APBD 2025 direncanakan sebesar 1,615T naik sedikit (49M) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,565T. Namun, kata dia, peningkatan belanja pegawai akibat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi salah satu beban utama.

Di katakan, pada 2024, belanja pegawai sudah mencapai Rp582 miliar, sementara pada 2025 meningkat tajam menjadi Rp727 miliar, atau bertambah sekitar Rp145 miliar. Namun, penambahan pendapatan daerah pada tahun ini diperkirakan hanya sebesar Rp27 miliar, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup signifikan. "Peningkatan ini menjadi beban tetap setiap tahun. Akibatnya, belanja modal infrastruktur tahun 2025 hanya sebesar Rp122 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp254 miliar. Penurunannya cukup drastis, yakni sebesar Rp131 miliar," jelasnya.

Selain itu, belanja barang, kegiatan seremonial, peringatan hari besar, perjalanan dinas, honor kegiatan, serta bimbingan teknis juga akan terdampak. Frananda mengajak agar seluruh jajaran memperketat pengelolaan anggaran dengan mengutamakan belanja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

"Kita perlu mengencangkan ikat pinggang sehingga, meskipun kondisi keuangan sulit, anggaran pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Belanja wajib mengikat, terutama terkait hak-hak ASN, juga harus dipenuhi," tambahnya. Tantangan lain muncul dari amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berpotensi menyebabkan refocusing atau pergeseran fokus anggaran oleh pemerintah pusat.

Hingga kini, ujarnya, pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari Kementerian Keuangan terkait potensi pengurangan pendapatan atau refocusing dana yang telah ditetapkan peruntukannya. Ia menyebut, dengan tantangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas anggaran sambil memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. "Keberlanjutan pembangunan menjadi tantangan utama dalam menghadapi dinamika keuangan di tahun mendatang," tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaraneews.com/berita/610446/tantangan-berat-apbd-tapsel-2025-belanja-pegawai-naik-infrastruktur-tertekan>, Selasa, 28 Januari 2025.
2. <https://sergap86.id/2025/01/29/apd-tapanuli-selatan-sumatera-utara-tahun-2025-naiknya-belanja-pegawai-dan-infrastruktur-tertekan>, Rabu, 29 Januari 2025.

#### **Catatan:**

##### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah.**

###### Pasal 1

- Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Angka 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- Angka 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Angka 19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 57

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan

## **2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.**

Diktum KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :

1. Membatasi belanja untu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah timm dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar

perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih efektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.